

Demokrasi Indonesia di tengah arus digitalisasi: Tantangan partisipasi politik generasi muda

Siti Wasilatul Qomariah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250503110106@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Demokrasi digital, partisipasi politik, generasi muda, media sosial, literasi digital

Keywords:

Digital democracy, political participation, youth generation, social media, digital literacy

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik demokrasi dan pola partisipasi politik di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial dan internet telah menjadi ruang baru yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi politik, menyuarakan aspirasi, serta terlibat dalam berbagai kegiatan demokrasi dengan lebih cepat dan terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan demokrasi Indonesia di tengah gelombang digitalisasi, bentuk-bentuk partisipasi politik

di kalangan generasi muda, serta berbagai tantangan yang muncul dalam demokrasi digital. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel ilmiah, dan literatur terkait demokrasi digital serta partisipasi politik di kalangan generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda melalui kampanye digital, diskusi daring, dan gerakan sosial berbasis internet. Namun, demokrasi digital juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, disinformasi politik, polarisasi sosial, politik identitas, literasi digital yang rendah, dan fenomena slacktivism. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik, literasi digital, dan inovasi demokrasi digital diperlukan untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang lebih partisipatif, inklusif, transparan, dan berkualitas di era digitalisasi.

ABSTRACT

The development of digital technology has significantly transformed democratic practices and patterns of political participation in Indonesia, particularly among young people. Social media and the internet have become new public spaces that enable citizens to access political information, voice their aspirations, and engage in democratic activities more quickly and openly. This study aims to analyze the development of Indonesian democracy in the midst of the digital era, the forms of political participation among young people, and the various challenges that have emerged in digital democracy. This study employs a literature review method, utilizing journals, academic articles, and relevant references on digital democracy and youth political participation. The findings indicate that digitalization has enhanced youth political participation through digital campaigns, online discussions, and internet-based social movements. However, digital democracy also presents several challenges, including hoaxes, political disinformation, social polarization, identity politics, low digital literacy, and the phenomenon of slacktivism. Therefore, strengthening political education, improving digital literacy, and developing innovations in digital democracy are crucial for creating a more participatory, inclusive, transparent, and high-quality democracy in Indonesia in the digital age.



Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan politik (Verba et al., 1978). Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan nasional melalui partisipasi politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara sah dalam pemilihan umum. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme peralihan kekuasaan, tetapi juga sebagai sistem yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, kesetaraan, supremasi hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan negara (Ekman & Amnå, 2012). Dalam konteks Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup kompleks dari waktu ke waktu. Setelah era reformasi 1998, Indonesia memasuki fase demokrasi yang lebih terbuka yang ditandai dengan meningkatnya kebebasan politik dan partisipasi publik dalam kehidupan bermasyarakat. Reformasi tersebut menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik, mengekspresikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Perubahan-perubahan ini terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengantarkan era digital dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Slamet et al., 2009).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi politik dan partisipasi publik dalam demokrasi (Boulianne, 2020). Munculnya internet dan media sosial telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi politik dengan cepat, mudah, dan tanpa batasan geografis. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, dan YouTube kini telah menjadi sarana utama bagi masyarakat terutama generasi muda untuk memperoleh informasi politik, menyuarakan pendapat, dan membangun identitas politik mereka (Putra et al., 2025). Transformasi ini telah mengubah ruang digital menjadi wadah baru demokrasi modern yang mampu memperluas akses publik terhadap isu-isu publik serta mendorong partisipasi politik yang lebih terbuka (Bennett & Segerberg, 2012).

Digitalisasi demokrasi telah melahirkan konsep e-demokrasi, yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses demokrasi untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi pemerintah, serta efektivitas komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat (Slamet et al., 2009). Melalui e-demokrasi, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi, menyampaikan kritik, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan bahkan memantau kebijakan pemerintah melalui platform digital. Munculnya e-demokrasi menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi yang signifikan untuk memperkuat demokrasi partisipatif di Indonesia.

Generasi muda memainkan peran yang sangat strategis dalam pengembangan demokrasi digital di Indonesia. Generasi Milenial dan Generasi Z adalah kelompok yang tumbuh besar di tengah kemajuan teknologi digital, sehingga mereka memiliki tingkat

kemahiran yang tinggi dalam menggunakan media sosial dan internet (Hutajulu et al., 2024). Data kependudukan menunjukkan bahwa generasi muda merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan juga akan menjadi blok pemilih terbesar pada pemilu 2024. Dominasi ini menempatkan generasi muda sebagai kekuatan politik yang sangat besar dalam menentukan hasil pemilu, arah kebijakan nasional, dan masa depan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda dalam demokrasi tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai faktor kunci dalam menciptakan demokrasi yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Partisipasi politik di kalangan generasi muda di era digital telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan pola partisipasi politik konvensional (Katili et al., 2025). Jika sebelumnya partisipasi politik dilakukan terutama melalui organisasi politik formal, kini generasi muda cenderung menggunakan media digital sebagai sarana utama untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Kaum muda secara aktif terlibat dalam kampanye digital, diskusi politik daring, petisi daring, dan gerakan sosial berbasis internet (Imaddudin & Susanto, 2020). Fenomena ini menandakan adanya pergeseran dari partisipasi politik konvensional menuju partisipasi politik digital yang lebih fleksibel, cepat, dan terbuka.

Di sisi lain, perkembangan demokrasi digital juga menghadirkan tantangan serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Kemudahan akses terhadap informasi sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, propaganda politik, ujaran kebencian, dan politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat (Morozov, 2011). Penyebaran informasi palsu di media sosial dapat memengaruhi opini publik dan merusak kualitas pengambilan keputusan politik. Selain itu, rendahnya literasi digital membuat banyak pengguna media sosial tidak mampu mengevaluasi informasi secara kritis, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh narasi politik yang manipulatif (Boulianne, 2020)..

Fenomena *slacktivism* juga menjadi tantangan signifikan bagi partisipasi politik kaum muda di era digital. *Slacktivism* adalah bentuk partisipasi politik minimalis yang terbatas pada aktivitas sederhana di media sosial, seperti menyukai, membagikan, atau mengomentari konten politik, tanpa keterlibatan nyata dalam proses politik formal (Boulianne, 2020). Tingginya tingkat aktivitas digital di kalangan generasi muda tidak selalu mencerminkan kualitas partisipasi politik yang substantif. Banyak kaum muda yang aktif di media sosial tetapi tidak terlibat langsung dalam organisasi politik, forum kebijakan publik, atau parkegiatan demokrasi lainnya.

Selain itu, kemunculan demokrasi digital juga telah memicu fenomena populisme politik, yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memobilisasi dukungan publik. Populisme sering kali menggunakan retorika emosional dan narasi yang disederhanakan untuk menarik simpati publik, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di media digital (Zaman, 2023). Dalam beberapa kasus, populisme dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga berpotensi memperparah polarisasi sosial dan konflik politik jika tidak diimbangi dengan budaya demokrasi yang sehat dan literasi politik yang memadai.

Demokrasi Digital

Perkembangan demokrasi digital di Indonesia mendorong partai politik dan pemerintah untuk mengubah strategi komunikasi politik mereka. Kampanye politik kini semakin banyak dilakukan melalui media sosial, dengan memanfaatkan video pendek, siaran langsung, podcast, dan berbagai bentuk konten visual lainnya. Strategi komunikasi digital dianggap lebih efektif dalam menarik perhatian generasi muda, yang lebih aktif di ranah digital daripada di ruang politik konvensional (Putra et al., 2025). Partai-partai politik berlomba-lomba membangun citra positif melalui media sosial dengan harapan mendapatkan dukungan dari pemilih muda.

Namun, meningkatnya intensitas kampanye digital belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kepercayaan generasi muda terhadap lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Banyak kaum muda yang masih memandang politik sebagai ranah yang dipenuhi oleh kepentingan elit, korupsi, dan manipulasi kekuasaan. Ketidakcocokan antara janji-janji politik dan implementasi kebijakan sering kali memicu sikap apatis terhadap politik formal. Akibatnya, sebagian generasi muda lebih memilih untuk terlibat dalam gerakan sosial atau demonstrasi digital daripada bergabung dengan partai politik atau organisasi pemerintah.

Dari perspektif Islam, demokrasi terkait erat dengan prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, dan kesetaraan hak. Islam mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah atau shura, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif. Nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan publik memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern (Soleh, 2005). Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar terkait konsep kedaulatan, di mana Islam menempatkan kedaulatan tertinggi pada Allah, sedangkan demokrasi modern menempatkan kedaulatan pada rakyat.

Di tengah berbagai tantangan demokrasi digital ini, pendidikan politik dan literasi digital merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik di kalangan generasi muda. Pendidikan politik diperlukan agar kaum muda tidak sekadar menjadi pengguna media sosial yang pasif, melainkan mampu memahami isu-isu politik secara kritis dan bertanggung jawab (Ekman & Amnå, 2012). Literasi digital juga sangat penting agar masyarakat dapat membedakan informasi yang akurat, menghindari disinformasi politik, serta menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat dan konstruktif di ranah digital (Boulianne, 2020).

Selain pendidikan politik, inovasi teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi digital berbasis demokrasi partisipatif, seperti E-Konstituen, yang dirancang untuk memperluas ruang ekspresi publik dan meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi (Ramadhan et al., 2022). Melalui inovasi digital semacam itu, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil-wakil yang mereka pilih, sehingga komunikasi politik menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Mengingat keadaan tersebut, penelitian berjudul “Demokrasi Indonesia di Era Digitalisasi: Tantangan Partisipasi Politik di Kalangan Generasi Muda” sangat penting untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi digital dapat mempengaruhi pola demokrasi dan partisipasi politik di kalangan generasi muda di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk partisipasi politik di kalangan generasi muda di era digital, mengidentifikasi tantangan demokrasi digital, serta menguraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia di tengah gelombang digitalisasi yang berkembang pesat.

Pembahasan

Demokrasi Indonesia di Era Digital Peran Media Sosial dalam Demokrasi

Digitalisasi telah membawa perubahan mendasar pada praktik demokrasi di Indonesia. Sebelum munculnya teknologi digital, komunikasi politik terutama dilakukan melalui media massa konvensional seperti televisi, radio, surat kabar, dan pertemuan tatap muka. Namun, perkembangan internet dan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik masyarakat, menjadikannya lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih interaktif (Boulianne, 2020). Informasi politik kini dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis. Transformasi ini telah menjadikan ruang digital sebagai wadah baru bagi praktik-praktik demokrasi modern (Slamet et al., 2009).

Pergeseran ini terlihat jelas dari meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Partai politik, tokoh publik, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan gagasan politik, menyelenggarakan kampanye, membentuk opini publik, serta menggalang dukungan masyarakat. Media sosial menyediakan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik, terutama bagi generasi muda, untuk mengemukakan pandangan mereka mengenai berbagai isu nasional secara lebih bebas dan terbuka.

Demokrasi digital juga memperkuat transparansi pemerintah karena masyarakat dapat secara langsung memantau kebijakan publik melalui media digital. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi publik, menyediakan layanan digital, dan membuka saluran komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, demokrasi digital meningkatkan efektivitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem demokrasi modern.

Namun, demokrasi digital juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Penyebaran disinformasi, propaganda politik, ujaran kebencian, politik identitas, dan polarisasi sosial telah menjadi masalah utama dalam perkembangan demokrasi digital di Indonesia. Kemudahan akses terhadap informasi sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan demi kepentingan politik tertentu. Situasi ini mengancam kualitas demokrasi karena masyarakat tidak lagi menerima informasi yang objektif dan akurat.

Peran Media Sosial dalam Demokrasi

Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pola komunikasi politik di masyarakat modern. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) memungkinkan informasi politik menyebar dengan cepat dan menjangkau

khalayak yang luas. Kaum muda merupakan pengguna media sosial yang paling aktif, sehingga platform-platform ini sangat penting dalam membentuk pandangan politik mereka (Putra et al., 2025).

Selain berfungsi sebagai sumber informasi, media sosial juga berperan sebagai forum publik untuk diskusi, memungkinkan masyarakat berinteraksi langsung dengan tokoh politik dan lembaga pemerintah. Interaksi semacam ini dapat meningkatkan transparansi politik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Bennett & Segerberg, 2012). Namun, tanpa pengawasan yang memadai dan literasi digital, media sosial juga berpotensi menjadi sarana penyebaran disinformasi dan konflik sosial.

Partisipasi Politik Generasi Muda

Generasi muda merupakan kelompok strategis dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Jumlah pemilih muda yang besar menjadikan mereka sebagai pemengaruh utama dalam arah politik nasional (Hutajulu et al., 2024). Partisipasi politik generasi muda tidak lagi terbatas pada penggunaan hak pilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup aktivitas digital seperti kampanye media sosial, petisi daring, diskusi politik daring, dan gerakan sosial berbasis internet (Katili et al., 2025).

Pergeseran bentuk partisipasi politik ini didorong oleh kemajuan teknologi digital, yang telah mempermudah akses terhadap informasi dan komunikasi. Kaum muda lebih cenderung menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pandangan politik mereka daripada melakukannya melalui organisasi politik formal. Fenomena ini menandakan pergeseran dari partisipasi politik konvensional menuju bentuk partisipasi politik digital yang lebih fleksibel dan terbuka (Ekman & Amnå, 2012).

Meskipun demikian, partisipasi politik generasi muda masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi politik, apatisme terhadap politik formal, dan maraknya disinformasi di media sosial. Banyak kaum muda yang aktif di media digital tetapi kurang memiliki pemahaman mendalam tentang politik, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh informasi yang tidak valid dan propaganda politik.

Aktivisme Daring dan Keasadaran Politik

Aktivisme daring telah menjadi salah satu bentuk partisipasi politik yang tumbuh paling pesat di era digital. Gerakan sosial seperti Reformasi Dikorupsi dan SaveKPK menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mobilisasi massa dalam menyuarakan aspirasi publik. Kaum muda memanfaatkan platform digital untuk mengorganisir aksi sosial, menyebarkan informasi, dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu tertentu (Bennett & Segerberg, 2012).

Namun, tidak semua aktivitas digital mencerminkan partisipasi politik yang substantif. Banyak aktivitas politik di media sosial yang hanya bersifat simbolis dan tidak diikuti dengan tindakan konkret di ranah politik. Fenomena ini dikenal sebagai “slacktivism” bentuk partisipasi minimalis yang terbatas pada berbagi konten atau meninggalkan komentar tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam proses politik yang sebenarnya (Boulianne, 2020). Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran kritis

sangatlah penting untuk memastikan bahwa partisipasi politik digital dapat memberikan dampak nyata terhadap demokrasi Indonesia.

Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia

Perkembangan demokrasi digital di Indonesia menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan partisipasi publik, namun juga menghadirkan tantangan kompleks terhadap kualitas demokrasi nasional. Salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi digital adalah maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi politik melalui media sosial. Informasi palsu yang menyebar dengan cepat sering kali digunakan untuk membentuk opini publik, menyerang lawan politik, atau memengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilihan umum (Morozov, 2011). Situasi ini menimbulkan ancaman serius bagi demokrasi karena masyarakat dapat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan konten yang manipulatif.

Hoaks politik biasanya disebarakan melalui konten visual, video pendek, atau narasi provokatif yang dirancang untuk memicu emosi publik. Kaum muda, yang merupakan pengguna aktif media sosial, sering kali menjadi sasaran utama disinformasi karena frekuensi penggunaan platform digital yang tinggi. Kurangnya kemampuan untuk memverifikasi informasi membuat sebagian orang mudah percaya dan membagikan kembali informasi yang mungkin tidak benar. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya berfungsi sebagai alat pendidikan politik justru dapat menjadi medan pertempuran bagi konflik sosial dan polarisasi politik.

Selain penyebaran disinformasi, polarisasi politik juga menjadi tantangan besar bagi demokrasi digital di Indonesia. Polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok politik yang saling bertentangan secara ekstrem. Media sosial sering memperburuk situasi ini melalui algoritma digital yang hanya menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Fenomena ini dikenal sebagai “ruang gema” suatu situasi di mana individu hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri sambil menolak perspektif yang berbeda (Morozov, 2011). Akibatnya, masyarakat menjadi semakin resisten terhadap pendapat yang berbeda dan lebih rentan terhadap konflik politik di ranah digital.

Fenomena politik identitas juga telah mendapatkan momentum yang signifikan di era digital. Masalah agama, etnis, ras, dan kelompok sosial sering dimanfaatkan dalam kampanye politik untuk mendapatkan dukungan dari segmen masyarakat tertentu. Munculnya politik identitas di media sosial dapat memperburuk hubungan sosial antar kelompok yang berbeda dan mengancam persatuan nasional. Dalam beberapa kasus, penggunaan politik identitas dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi memicu diskriminasi, intoleransi, dan konflik sosial yang berkepanjangan.

Tantangan lain dalam demokrasi digital adalah rendahnya tingkat literasi digital dan politik di kalangan masyarakat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Banyak pengguna media sosial yang dapat mengakses informasi dengan cepat, namun kurang memiliki kemampuan

untuk memverifikasi sumber informasi secara objektif. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat rentan terhadap propaganda politik, ujaran kebencian, dan informasi yang provokatif (Boulianne, 2020). Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di era digital.

Fenomena Hoaks dan Disinformasi Politik

Hoaks politik telah menjadi salah satu isu utama dalam perkembangan demokrasi digital di Indonesia. Penyebaran informasi palsu biasanya meningkat menjelang pemilihan umum atau ketika muncul isu politik tertentu. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat tanpa verifikasi yang memadai, sehingga masyarakat sering kali menerima informasi yang mungkin tidak benar. Situasi ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap tokoh politik, partai politik, dan kebijakan pemerintah.

Disinformasi politik tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Ketika masyarakat terus-menerus terpapar informasi yang saling bertentangan dan tidak valid, kepercayaan terhadap pemerintah, media, dan lembaga-lembaga demokrasi dapat menurun. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memerangi penyebaran hoaks politik melalui peningkatan literasi digital dan pengawasan terhadap konten media sosial.

Polarisasi Politik dan Ruang Gema

Evolusi algoritma media sosial menciptakan pola komunikasi yang cenderung memperkuat polarisasi politik di masyarakat. Algoritma digital umumnya menampilkan konten yang selaras dengan minat dan sudut pandang pengguna, sehingga pengguna lebih sering menerima informasi yang memperkuat keyakinan mereka sendiri. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang terbuka terhadap perspektif yang berbeda dan lebih rentan terjebak dalam konflik politik.

Fenomena ruang gema menyebabkan ruang digital kehilangan fungsinya sebagai ruang yang sehat untuk dialog demokratis. Orang-orang cenderung berinteraksi hanya dengan kelompok yang memiliki pandangan politik yang sama, sehingga mempersempit ruang untuk diskusi publik yang objektif dan inklusif. Oleh karena itu, pendidikan politik dan budaya demokrasi diperlukan untuk mendorong orang menghormati pendapat yang berbeda dan menumbuhkan komunikasi politik yang lebih konstruktif.

Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik di Kalangan Pemuda

Untuk mengatasi berbagai tantangan demokrasi digital, diperlukan upaya strategis guna meningkatkan kualitas partisipasi politik di kalangan pemuda. Salah satu langkah penting adalah memperkuat pendidikan politik bagi pemuda sejak usia dini. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan pemilihan umum, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran kritis, sikap demokratis, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, organisasi masyarakat sipil, komunitas pemuda, dan media digital. Sekolah dan universitas memainkan peran penting dalam menumbuhkan pemahaman politik di kalangan pemuda melalui pendidikan kewarganegaraan, diskusi publik, simulasi demokrasi, dan berbagai kegiatan organisasi mahasiswa. Dengan pendidikan politik yang efektif, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi juga mampu berpartisipasi secara substantif dalam proses demokrasi.

Selain pendidikan politik, peningkatan literasi digital juga merupakan langkah penting dalam mengatasi tantangan demokrasi digital. Literasi digital diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak, memahami cara kerja algoritma digital, memverifikasi informasi, serta menghindari penyebaran disinformasi dan propaganda politik. Literasi digital juga membantu masyarakat menumbuhkan budaya komunikasi yang sehat serta rasa hormat terhadap perbedaan pendapat di ranah digital.

Pendidikan Politik dan Literasi Digital

Pendidikan politik memainkan peran penting dalam membentuk karakter demokratis generasi muda. Melalui pendidikan politik, kaum muda dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, memahami proses demokrasi, serta mengembangkan kesadaran untuk terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik (Ekman & Amnå, 2012).

Sementara itu, literasi digital membantu masyarakat memahami cara kerja media digital dan bagaimana informasi dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Dengan keterampilan literasi digital yang kuat, generasi muda dapat menjadi pengguna media sosial yang kritis dan bijaksana yang tidak mudah terpengaruh oleh propaganda politik atau berita palsu (Boulianne, 2020).

Inovasi Demokrasi Digital

Kemajuan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi demokrasi yang lebih partisipatif dan transparan. Salah satu inovasi tersebut adalah penggunaan aplikasi digital untuk menyalurkan aspirasi publik secara langsung kepada pemerintah dan wakil rakyat (Ramadhan et al., 2022). Inovasi seperti E-Konstituen menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga pemerintah.

Melalui inovasi dalam demokrasi digital, masyarakat dapat memberikan masukan terkait kebijakan publik, berpartisipasi dalam forum diskusi daring, dan mengakses informasi pemerintah secara lebih terbuka. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam demokrasi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia (Slamet et al., 2009; Ramadhan et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik demokrasi dan pola partisipasi politik di Indonesia. Kehadiran media sosial dan

internet telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengakses informasi politik, menyuarakan aspirasi mereka, dan terlibat dalam berbagai kegiatan demokrasi secara lebih terbuka dan cepat. Generasi muda telah menjadi kelompok strategis dalam perkembangan demokrasi Indonesia karena mereka merupakan mayoritas pemilih nasional dan memiliki kapasitas mobilisasi yang tinggi melalui ruang digital.

Namun, demokrasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan serius, seperti penyebaran hoaks, disinformasi politik, polarisasi sosial, politik identitas, rendahnya literasi digital, dan fenomena slactivisme. Tingginya tingkat aktivitas politik di kalangan generasi muda di media sosial belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi politik yang substantif. Sebagian besar aktivitas politik digital ini masih bersifat simbolis dan belum diikuti oleh keterlibatan nyata dalam proses politik formal atau pembentukan kebijakan publik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri untuk memperkuat pendidikan politik dan literasi digital di kalangan generasi muda. Pendidikan politik dan literasi digital merupakan langkah penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis, meningkatkan kemampuan berpikir objektif, serta menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab di ranah digital.

Selain itu, inovasi teknologi dalam bidang demokrasi harus terus dikembangkan guna memperluas peluang partisipasi masyarakat serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Media sosial dan platform digital harus dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik, transparansi pemerintahan, dan penguatan demokrasi partisipatif, bukan sekadar sebagai wadah propaganda politik dan konflik sosial. Dengan demikian, di tengah gelombang digitalisasi, demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, transparan, dan berkualitas tinggi yang mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Boulianne, S. (2020). Twenty years of digital media effects on civic and political participation. *Communication Research*, 47(7), 947–966.
- Ekman, J., & Amnå, E. (2012). Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology. *Human Affairs*, 22(3), 283–300. <https://doi.org/10.2478/s13374-012-0024-1>
- Hutajulu, S., Ginting, S., & Manasyekh, Y. (2024). Digitalisasi Budaya Politik Melalui Peran Generasi Milenial dan Gen Z Di Indonesia. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(2), 239–248.
- Imaddudin, & Susanto, T. (2020). Pembangunan Partisipasi Politik Generasi Muda Melalui Website dan Twitter Jejak Parlemen. *Channel: Jurnal Komunikasi Учредители: Universitas Ahmad Dahlan*, 8(1), 17.

- Katili, A. Y., Katili, A. A. Z., & Pariono, A. (2025). Partisipasi Politik Generasi Muda di Era Digital: Antara Kesadaran Kritis dan Aktivisme Daring. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(4), 198–212. <https://doi.org/10.69623/j-emspol.v2i4.175>
- Morozov, E. (2011). *The dark side of internet freedom. The Net Delusion*. New York: Public Affairs, 245–275.
- Putra, A., Asrul, A., Rajab, M., & Nur, L. O. M. A. (2025). Dinamika Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilu di Era Media Sosial. *Portal Riset Dan Inovasi Sistem Perangkat Lunak*, 3(3), 125–130. <https://doi.org/10.59696/prinsip.v3i3.165>
- Ramadhan, A. A., Utama, I. P. A. A., & Arkan, J. (2022). E-Konstituen: Inovasi Aplikasi Digital Berbasis Digital Operating System Untuk Meningkatkan Peran Generasi Muda di Era Demokrasi Digital. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 35–45. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v4i1.17068>
- Slamet, S., Hamdan, A. R. B., & Deraman, A. (2009). E-demokrasi di Indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Soleh, A. K. (2005). Islam dan Demokrasi. *El-Jadid: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam*, 3(1), 111–126. <https://repository.uin-malang.ac.id/15166/>
- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. (1978). *Participation and political equality: A seven-nation comparison*. Cambridge university press.
- Zaman, S. (2023). Mengatasi populisme politik: Pendekatan demokratis berbasis penyelesaian masalah dan partisipasi publik. <https://repository.uin-malang.ac.id/14994/>